

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)**

SKRIPSI

ANI OKTAVINA

105730511114



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

HALAMAN JUDUL

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)**

Oleh :

ANI OKTAVINA

105730511114

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan
studi pada program studi strata 1 akuntansi

Program Studi Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah : 286)

Napoleon Hill

“ Cari tahu apa yang benar-benar anda sukai, dan kemudian lakukan sebagai cara untuk menemukan hidup yang baik”

“ Punyailah cita-cita yang tinggi dan simpanlah cita-cita itu di dalam kepalamu dan Langkahkan kakimu dengan teguh dan berani, bekerja keraslah dan tekun untuk mewujudkan cita-citamu, tetapkan hatimu jika kamu benar, dan beranilah membela pendapatmu dengan suatu tindakan meskipun ini berarti untung-untungan”

(Penulis)

Sujud Syukur ku persembahkan pada ALLAH SWT yang maha kuasa, berkat rahmat umur yang panjang dan kesehatan yang di berikannya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Orang tuaku tercinta Muh. Risa dan Muliati yang dengan penuh kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran yang telah mendidik dan membimbing ananda dari kecil hingga dewasa serta tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan moril sampai ananda mendapat gelar SE.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pemerintah
Daerah Kabupaten Gowa)"

Nama Mahasiswa : Ani Oktavina

No. Stambuk/NIM : 105730511114

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018

Makassar, 11 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. Edi Jusriadi, SE., MM
NIDN: 0922027901

Pembimbing II,

Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NIDN: 092101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ismail Rasudong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama Ani Oktavina, NIM 105730511114, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009 / 2018 M, Tanggal 26 Muharram 1440 H / 6 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, _____
6 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM. (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim, HR, SE., MM (.....)
2. Mira, SE., M.Ak (.....)
3. Muttiarni, SE., M.Si (.....)
4. Andi Arnan, SE., M.Si., Ak.CA (.....)

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Oktavina

Stambuk : 105730511114

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 11 Oktober 2018

Membuat Pernyataan,



Ani Oktavina

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Ketua Program Studi Akuntansi,

Ismail Badolahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM: 107 3428

ABSTRAK

Ani Oktavina, 2018. **Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Pemerintah daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)**. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh pembimbing I Edi Jusriadi dan Pembimbing II Abd.Salam.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Gowa. Untuk menjawab permasalahan diatas dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan wawancara dan kuesioner dan beberapa data sekunder pendukung lainnya. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Gowa saat ini sudah transparansi dan akuntabel. pengendalian keuangan daerah di Kabupaten Gowa selaku Inspektorat Daerah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Namun Walaupun pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sudah efektif namun sistem dalam melakukan pengawasan belum tertata dengan baik sehingga masih perlu perbaikan agar pengawasan dan pengendalian yg dilakukan lebih efektif Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Pengelolaan Keuangan, Pengawasan dan Pengendalian, Transparansi dan akuntabel.

ABSTRACT

*Ani Oktavina, 2018. **Evaluation of Regional Government Financial Management Supervision and Control (Case Study of Gowa District Government)**. Thesis, Faculty of Economics and Business, Department of Accounting, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by advisor I Edi Jusriadi and Advisor II Abd. Salam.*

This study aims to find out the process of implementing regional financial control and control in realizing management transparency and accountability regional finance. This research is expected to benefit the Government Gowa Regency. To answer the above problems in this thesis the writer uses descriptive approach method. In collecting the data using interviews and questionnaires and some other supporting secondary data. Then the researchers analyzed the data and interpreted the data obtained.

The results of the study show that the implementation of Supervision and Control of regional financial management in Gowa Regency is currently transparent and accountable . regional financial control in Gowa Regency as Inspectorate The region has carried out its duties according to the Regulations that have been set. However, although the implementation of supervision and control is effective however, the system of conducting supervision has not been well organized so that it still needs improvement so that supervision and control are carried out more effectively so as to produce more transparent and accountable financial reports.

Keywords: Financial Management, Supervision and Control, Transparency and Accountability.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur Tiada hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)” dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi Stara-1 di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Ak. CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si., Ak. CA. CSP selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.Edi Jusriad, SE., MM dan Bapak Abd.Salam, SE., M.Si., Ak. CA. CSP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan

memberikan saran, masukan, arahan dan motivasi demi terwujudnya penyelesaian skripsi ini.

5. Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Orang tua, saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Sahabat-sahabat terbaikku yang senantiasa membantu dan memberikan motivasi demi tercapainya penyelesaian proposal skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan terkhususnya kelas Ak.12.14 atas segala kenangan yang pernah kita lewati bersama.

Kami menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di lapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Makassar, Oktober 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	9
B. Pengawasan	11
C. Pengelolaan Keuangan Daerah	15
D. Nilai Informasi Laporan Keuangan	16
E. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	17
F. Penelitian Terdahulu	20
G. Kerangka Pikir.....	26

III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian	32
G. Teknik Analisis Data.....	32
IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Profil Pemerintah Kabupaten Gowa.....	38
1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	38
2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah.....	42
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian.....	51
1. Penyajian Data Penelitian	51
a. Deskripsi Karakteristik Responden.....	52
b. Deskripsi Tanggapan Responden /variabel penelitian	53
B. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.....	73
1. Transparansi Pengelolaan Keuangan	73
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	77
VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	24
5.1	Rincian Penyebaran Kuesioner	52
5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	53
5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan	54
5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	55
5.5	Tanggapan Responden untuk Penganggaran Berbasis Kinerja	56
5.6	Tanggapan Responden untuk Pengawasan Preventif.....	59
5.7	Tanggapan Responden untuk Pengawasan Fungsional.....	62
5.8	Tanggapan Responden untuk Efektivitas Pengendalian Anggaran	65
5.9	Total Akumulasi Responden	68
5.10	Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.....	71

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir.....	28
4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kab.Gowa	49
5.1 Ruang Lingkup Pengawasan	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat
2. Surat Penelitian
3. Lembar Kontrol Bimbingan
4. Kuesioner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah membentuk perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah, dimana perangkat daerah ini disebut dengan unit-unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap tuntutan publik atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dalam menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang merupakan perbaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatankualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, sertadukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Menurut Tayib dalam Mardiasmo, laporan keuangan sektor publik merupakan kendaraan untuk menunjukkan akuntabilitas publik.

Rangkaian pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) wajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup : (1) laporan realisasi anggaran, (2) neraca keuangan daerah, (3) laporan arus kas, (4) catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan daerah adalah mengatur penyusunan laporan keuangan yang merupakan salah satu kewajiban dari

pemerintah kabupaten /kota dalam menyelenggarakan dan mengelola keuangan daerah dalam 1 (satu) periode anggaran (Hariadi, 2010:131).

Governmental Accounting Standard Board dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan umum pengelolaan keuangan daerah yang di tetapkan dalam peraturan pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, asas umum tersebut sesuai dengan isi pasal 4 dari peraturan pemerintah (Abdul Hafis,2013),yaitu:

1. Keuangan daerah di kelola secara tertib ,taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab,dengan memperhatikan asas keadilan,dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah di wujudkan dalam APBD yang setiap tahun di tetapkan dengan peraturan daerah.

Laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah daerah akan di gunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang di tunjukkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah kabupaten gowa dinas pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu cara untuk melihat apakah laporan keuangan yang telah di susun sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mendapatkan pengawasan dan Pengendalian keuangan daerah yang baik sehingga menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang di harapkan, dapat di lihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerinah daerah (LKPD), Kabupaten Gowa di nilai sudah mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan memberikan Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) tahun anggaran 2016. Pemberian Opini tersebut tidak lepas dari pengaruh

pengawasan keuangan daerah serta pemanfaatan teknologi informasi yang baik sehingga berpengaruh terhadap nilai informasi yang diharapkan (Rakyatku News, 11 Februari 2017).

Selain dari Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) yang dicapai pemerintah Daerah Kabupaten Gowa masih terdapat masalah antara lain Andi Kangkung Lologau (Kepala BPK RI Sulsel) mengatakan, berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Kinerja atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai SOP (*standard operating procedure*) terkait sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses pemenuhan pendidikan dasar. Begitu juga terkait Penyelenggaraan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) antara lain sumber daya manusia kesehatan yang belum memadai dan sarana prasarana dalam rangka menunjang program JKN juga belum memadai. (AntaraneWS, 22 Desember 2016)

Sehingga dengan permasalahan di atas maka dapat disimpulkan laporan keuangan masih perlu perbaikan dan pemerintah daerah dituntut untuk dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada sesuai dengan mandat pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dan pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau memberi penjelasan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LPH. sehingga apabila tidak segera di tindak lanjut maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan,

kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan pengendalian agar masalah tersebut cepat diselesaikan sehingga dapat meningkatkan Laporan Keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Fakta dan fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Dikatakan oleh Simanjuntak bahwa perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sebelum reformasi belum menggembirakan. Saat itu, akuntansi pemerintahan di Indonesia belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode tersebut, *output* yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat, terlambat, dan tidak informatif, sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan.

Pengawasan dan Pengendalian keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gowa.

Berdasarkan paparan yang telah di jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Menghasilkan Laporan Keuangan yang Transparansi dan Akuntabel.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Keuangan dalam Menghasilkan Laporan Keuangan yang Transparansi dan Akuntabel

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

- a) Melalui penelitian ini, Peneliti mencoba memberikan sumbangan data empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi ataupun manajemen yang meneliti tentang Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat bagi masyarakat agar dapat memberikan partisipasi,serta kontribusi dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan daerah.
- b) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pentingnya pengawasan dan Pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
2. Penilaian Risiko Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.
4. Informasi dan Komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.
5. Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan reviu lainnya.

Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian

sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002)

pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung- jawaban APBD. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

2. Tujuan pengawasan

Pengawas dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya memiliki tujuan tertentu, menurut Wardoyo (1986) dalam Hendra (2011), tujuan pengawasan adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu atau yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan azas yang telah ditetapkan.
- b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.
- c) Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana semula.
- d) Untuk mencari jalan keluar apabila ternyata ada ditemui kesulitan dan kegagalan kearah perbaikan.

3. Sifat pengawasan

Sifat-sifat pengawasan dikemukakan Siagian dalam Kamar (2004) dalam Salman (2001) meliputi:

- a. Mencari fakta tentang tugas yang dilaksanakan dan aspek psikologis seperti rasa hormat, dihargai dan kemajuan dalam karir.
- b. Preventif untuk mencegah penyimpangan dan penyelewengan.
- c. Diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- d. Sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi.
- e. Mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikerjakan.
- f. Tidak menghambat usaha peningkatan efisiensi.
- g. Bukan mencari atau menentukan siapa yang salah tetapi menemukan apa yang tidak benar.
- h. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan tugasnya.

4. Prinsip Pengawasan

Menurut Kamar, 2004 (dalam Salman, 2001) mengatakan prinsip pengawasan antara lain:

- a. Pengawasan hendaknya dimulai sejak rencana disusun yang menyangkut efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan penggunaan sumber daya.
- b. Temuan pengawasan harus ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang terkait.
- c. Pengawasan hendaklah orang yang mempunyai kemampuan teknis, kesungguhan kerja dan kepribadian terpuji.
- d. Pengawasan hendaklah dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun, tidak boros, tepat waktu dan mengenai objek yang tepat.

5. Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

- a). Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran.
- b). Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya.
- c) berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah.
- d) Kualitas dan kuantitas kasus- kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya.
- e) Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004), pengelolaan/pengurusan umum keuangan daerah berkenaan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Chabib (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas
2. Value for money
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
4. Transparansi
5. Pengendalian

Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
- c. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
- d. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

D.Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku. Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh

pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain:

1. Relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

E. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohammed dkk. (2011) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi).

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah Pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang melibatkan variabel-variabel serupa dengan yang di uji oleh penulis dalam penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian yang instrumentnya direplikasi untuk mengukur variabel yang di uji. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Sitti Nurjannah Saleba (2014), Dimana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah.dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerpan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan.Daerah Oleh Fitri Zalni (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) Oleh Suprayogi (2010),dimana hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia ,Pemanfaatan Teknologi Informasi,dan Pengendalian Internn Akuntansi terhadap keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Darwanis dan Desi Dwi Mahyani(2009). Di mana hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Hasil penelitian Arfianti (2011) Menemukan bahwa laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang di syartkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.Bila ternyata kemudian di temukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera di deteksi atau di ambil tindakan koreksi.sehingga informasi keuangan dapat segera di guanakan oleh pemakai,dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan kualitas laporan keuangan yang baik.
6. Penelitian Fikri (2011) tentang pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota padang SIKD dan

pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan melalui alat analisis yaitu analisis jalur.

7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, Oleh Gerry Armando (2013) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi.
8. Analisis Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Ahmad Ridwan dimana hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan masih membutuhkan perbaikan.
9. Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara oleh Josua H.R.Lumbantobing, David P.E Saerang, Heince Wokas (2013) Hasil Penelitian menunjukkan Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Kurang dan Belum Mendukung Kegiatan Audit, Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat sebagai pendukung kegiatan pengawasan kurang dari 1% dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
10. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional Terhadap

Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru), Joni Iskandar (2015). Hasil Penelitian menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin baik pengawasan fungsional maka pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin efektif.

Tabel 2.1 Mapping Penelitian terdahulu

No	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pengendalian Intern pemerintah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Sitti Nurjannah Saleba (2014)	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda	berpengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah.dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah
2	Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, Fitri Zalni (2013)	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi berganda.	hasil penelitian menunjukkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.
3	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung), Suprayogi (2010)	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi berganda	hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

4	Darwanis, Desi Dwi Mahyani (2009).	Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Metode analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
5	Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Arfianti (2011)	Metode analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Menemukan bahwa laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang di syaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.
6	pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada instansi pemerintah kota padang, Arfianti (2011)	Menggunakan Alat Analisis Jalur	SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan
7	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah, Gerry Armando (2013)	Teknik analisis data menggunakan analisis jalur	hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukit tinggi.
8	Analisis Pengendalian Internal Atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah oleh, Ahmad Ridwan	Dengan mempergunakan metode penelitian Lapangan, Riset dan pemahaman	hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa sistem pengelolaan keuangan masih membutuhkan perbaikan

		pendekatan SPI OKP6	
9	<p>Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah</p> <p>(Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara). Josua H.R. Lumbantobing, David P.E. Saerang, Heince Wokas (2013).</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.</p>	<p>Jumlah dan Kompetensi Tenaga Pengawas pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara</p> <p>Kurang dan Belum Mendukung Kegiatan Audit, Anggaran yang diberikan kepada Inspektorat sebagai pendukung kegiatan pengawasan kurang dari 1% dari anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara</p>
10	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru), Joni Iskandar (2015)</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.</p>	<p>sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin bagus penerapan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin efektif juga pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Pekanbaru. pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Pekanbaru. Semakin baik pengawasan fungsional maka pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Pekanbaru akan semakin efektif</p>

Sumber : Berbagai Jurnal (2018)

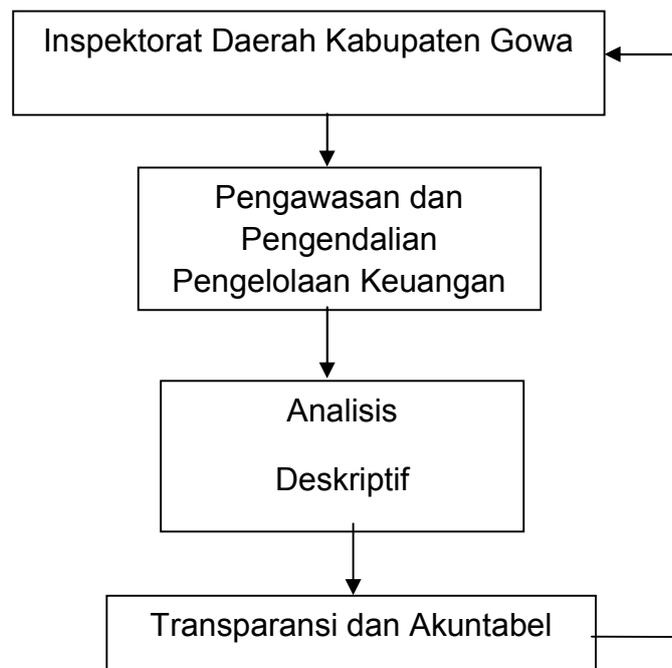
Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana mengevaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih transparan dan akuntabel, sedangkan penelitian diatas bertujuan untuk meneliti apakah pengawasan dan pengendalian mempengaruhi efektivitas laporan keuangan, Kesamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan di pemerintah daerah.

G. Kerangka Konsep

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Atas Pengelolaan Keuangan sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang Transparansi dan Akuntabel di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa . Untuk mencapai pemerintahan yang *Good Governace* yang di perlukan adanya pemerintah yang partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan Akuntabel kepada semua level pemerintahan. Apalagi dengan Di Undang-undangkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun dari penelitian ini Good Governace yang di maksudkan bukan untuk mencari Kesalahan Oknum yang membuat kesalahan, penyimpangan atau penyelewengan atas penggunaan keuangan kemudian memberikan sanksi, Melainkan Good Governace yang di maksud dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah, dimaksudkan untuk menjamin supaya sumber-sumber dan penggunaan keuangan tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan

yang berlaku, sehingga otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat menjadi kenyataan



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif penelitian deskriptif meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam kuesioner, wawancara, ataupun observasi.

B. Fokus Penelitian

Peneliti ingin mengevaluasi proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan dengan melakukan penelitian dengan cara melakukan observasi, pembagian kuesioner, dan wawancara serta mengumpulkan data yang terkait dengan proses penelitian ini.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi Lokasi Penelitian dalam memperoleh data adalah pada SKPD Kabupaten Gowa yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan Waktu penelitian ini telah di laksanakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 17 Juli 2018

D. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang kemudian diklasifikasikan menurut bentuk tanggapan atau respon yaitu diklasifikasikan sebagai data lisan (*verbal*) karena data yang diperoleh berasal langsung dari informan melalui wawancara. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak SKPD yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan dokumen-dokumen di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. karna Jumlah pegawai di Inspektorat

hanya 30 orang maka peneliti menggunakan total sampling yaitu adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan Populasi (Sugiyono,2007)

Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah :

- a) Pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten gowa.
- b) Pegawai yang berpendidikan Minimal SLTA
- c) Pegawai yang telah bekerja minimal 1 tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan data untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Secara Langsung

- a) Observasi, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat penelitian dan melakukan survey terhadap tempat dalam hal penelitian ini.
- b) Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup.suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau meyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.
- c) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan Irban I Dokumen, Mengambil dokumen profil Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.

2. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan , website dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan *survey*, observasi, wawancara ,kuesioner hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian,yaitu sebagai berikut:

1. Perekam suara
2. Buku catatan
3. angket
4. Kamera

G. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan kejadian.

Metode pengolahan data dalam bentuk kuesioner. Dimana jumlah pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 30 orang, dan akan dilakukan survey dengan mengambil sampel. Sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%.

Dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N= Ukuran Populasi Sampel

e = Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Maka sampel yang dibutuhkan 30

$$(1 + 30 \times 0,05)^2$$

= 27,9 di bulatkan jadi 28 Orang Pegawai.

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Pengawasan dimana indikator yang digunakan adalah Pengawasan Preventif, Pengawasan Fungsional yang terdiri dari: 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) Evaluasi kegiatan; 3) Pencatatan transaksi berdasarkan bukti; 4) Pencatatan transaksi tepat waktu; 5) Dokumentasi bukti transaksi; 6) Sistem pengawasan pelaksanaan tugas; 7) Laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, pengendalian menggunakan indikator dari penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang terdiri dari: 1) Realisasi anggaran; 2) Kesesuaian dengan Peraturan; 3) Pengkajian; 4) Pengusutan dan Transparansi dan akuntabilitas anggaran indikatornya adalah 1) Laporan keuangan sesuai SAP 2) Disiplin Anggaran 3) Keadilan Anggaran 4) Efisiensi dan efektifitas anggaran 5) Pendekatan Kinerja.

Skala yang digunakan dalam penyusunan kuisisioner penelitian ini adalah skala likert 5 point dimana skor STS (1), TS (2), N (3), S (4), SS (5).

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

R = Ragu-ragu

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). (Gozali, 19 ; 2013). Analisis deskriptif pada penelitian ini menyediakan tentang identitas responden, responden terhadap variabel penelitian.

a. Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab lengkap oleh responden

b. Menghitung Nilai Jawaban

- 1) Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan, Mengutip dari Buku Nazir M. "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia; Bogor; Tahun 2005, dalam membuat skala likert, ada beberapa langkah prosedur yang harus dilakukan peneliti, antara lain :
- 2) Menghitung skor total item dengan menggunakan rumus:

$$T \times P_n$$

Dimana:

T : Total jumlah responden yang memilih

P_n : Pilihan angka Skala Likert

(Setelah itu semua hasil Dijumlahkan untuk mendapatkan total skor)

3) Interpretasi Skor Perhitungan

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus di ketahui skor tertinggi (Y) dan Skor Terendah (X) untuk item penilaian sebagai berikut :

$$Y = \text{Skor tertinggi likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$X = \text{Skor terendah likert} \times \text{jumlah responden}$$

4). Penyelesaian Akhir

Pra Penyelesaian yaitu sebelum menyelesaikannya kita juga harus mengetahui interval (rentang jarak) dan Interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari interval skor persen dengan intervalnya jarak terendah 0% hingga tertinggi 100%.

Rumus Interval :

$$I = \frac{100}{\text{Jumlah Skor (Likert)}}$$

Penyelesaian Akhir =

$$\text{Rumus Index \% : } \frac{\text{Total Skor}}{Y \times 100}$$

Teknik pengolahan data dilakukan setelah data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan internet *searching* yang membantu dalam pengolahan data tersebut. Adapun langkah–langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
- b) Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
- c) Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
- d) Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Adapun Prosedur data adalah sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan data melalui instrument pengumpulan data.
2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrument pengumpulan data.
3. Tahap pengkodean, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari tiap pertanyaan yang terdapat dalam instrument pengumpulan data.
4. Tahap penyajian data dengan merangkai data menjadi satu kesatuan agar dapat di rumuskan kesimpulan dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan serta mendapatkan hasil yang valid.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Profil Pemerintah Kabupaten Gowa

Gambaran lokasi penelitian akan menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Gowa, dan gambaran umum mengenai Inspektorat Daerah. Gambaran umum Kabupaten Gowa mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi dan misi Kabupaten Gowa. Sedangkan Inspektorat Daerah meliputi uraian tugas, fungsi dan Struktur organisasi serta visi dan misi Inspektorat Daerah.

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggi moncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggi moncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km² dan panjang 90 Km. Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama

dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km² yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m³ dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Jumlah penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2009 sebesar 695.697 jiwa, laki-laki berjumlah 344.740 jiwa dan perempuan sebanyak 350.957 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut 99,18% adalah pemeluk Agama Islam. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan.

b. Kondisi Demografi

Kabupaten Gowa termasuk Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil

Susenas 2007, penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 2007 bertambah sebesar 1,43%. Persebaran penduduk di Kabupaten Gowa pada 18 kecamatan bervariasi. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduk per kecamatan yang masih sangat timpang. Untuk wilayah Somba Opu, Pallangga, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng dan Bajeng Barat, yang wilayahnya hanya 11,42% dari seluruh wilayah Kabupaten Gowa, dihuni oleh sekitar 54,45% penduduk Gowa. Sedangkan wilayah Kecamatan Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Barombong, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu, yang meliputi sekitar 88,58% wilayah Gowa hanya dihuni oleh sekitar 45,55% penduduk Gowa. Keadaan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan geografis daerah tersebut.

Kelompok umur, penduduk anak-anak (usia 0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,12%, sedangkan penduduk usia produktif mencapai 63,18% dan penduduk usia lanjut terdapat 5,70% dari jumlah penduduk di Kabupaten Gowa. Dilihat dari jenis kelamin, maka dari total jumlah penduduk Kabupaten Gowa, terdapat 293.956 atau 49,45% laki-laki dan 300.467 atau 50,55% perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di Kabupaten Gowa jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan seperti yang tampak pada rasio jenis kelamin

penduduk yang mencapai 98 artinya ada sejumlah 98 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

c. Visi dan Misi Kabupaten Gowa

1) Visi

“Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”

2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
- b. Meningkatkan interkoneksi wilayah dan keterkaitan ekonomi, Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
- c. Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu padakelestarian lingkungan.

2. Gambaran Umum Inspektorat Daerah

a. Uraian Tugas dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gowa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Inspektorat

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Inspektorat

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan program pengawasan;
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- 4) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan;
- 5) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok jabatan fungsional;
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan perasarana serta kesekretariatan inspektorat;
- 8) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III

a. Inspektur

Tugas

Inspektur Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dibidang Pengawasan.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumberdaya aparat pengawas;

- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pengawasan;
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dengan instansi terkait;
- 5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas;
- 6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP.

b. Sekretaris

Tugas

Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.

Fungsi

- 1) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- 2) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

- 3) Penyusunan bahan, data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- 4) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, surat menyurat dan rumah tangga;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV

Tugas

Melaksanakan membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Fungsi

- 1) Perencanaan program pengawasan;
- 2) Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan;

- 3) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan dan membantu sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Gowa, bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri

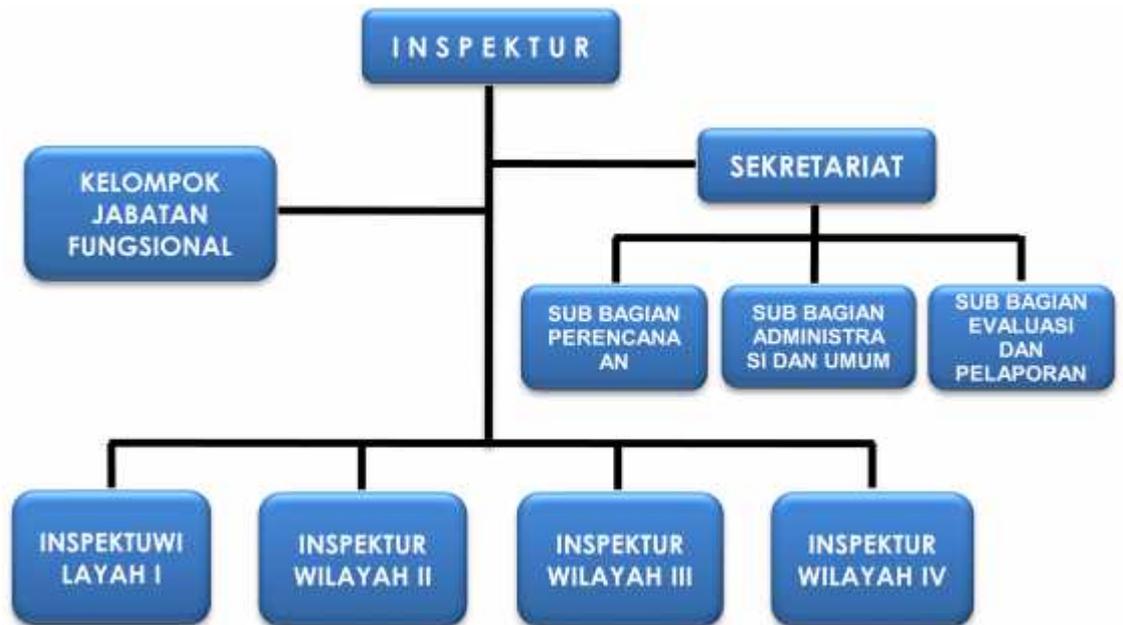
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten dan Daerah.

1. Struktur Organisasi Inspektorat

Susunan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa terdiri dari:

- a. Inspektur (Eselon IIb)
- b. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan (Eselon IVa)
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)
 - 3) Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa)
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa



c. Visi dan Misi

1. Pernyataan Visi

Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Inspektorat **Periode Tahun 2016-2021**, yaitu: **“TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF DALAM MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH”**

Makna **Profesional** adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal, dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawal Visi, Misi, dan Program-Program strategis Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021, sedangkan makna **Responsif** adalah suatu upaya organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh, untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pernyataan Misi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gowa, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan serta kelembagaan pengawasan dan tata laksana.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Penyajian Data Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa Sudah sangat baik terbukti dengan Opini WTP yang di peroleh oleh Pemerintah Kabupaten Gowa Selama 5 Tahun oleh BPK RI, Selain itu pengelolaan keuangan di Kabupaten Gowa telah mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat di simpulkan bahwa Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Gowa sudah Transparansi dan Akuntabilitas.

Data penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dan wawancara dengan mendatangi langsung lokasi , yaitu di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa.Dimana hal-hal yang diteliti dalam kuesioner adalah Transparansi dan akuntabilitas Objek yang di teliti mengenai penganggaran berbasis kinerja dan untuk meneliti pengawasan maka di teliti pengawasan preventif dan Fungsional dan untuk pengendalian maka di teliti Efektifitas Pengendalian Anggaran.

Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan kurang lebih tiga minggu yaitu dari tanggal 28 juni- 17 juli 2018. Saat pengembalian kuesioner, terdapat 25 kuesioner yang kembali dari 28 kuesioner yang disebar, terdapat 25 kuesioner yang dapat diolah, 3 kuesioner yang tidak kembali. Adapun rincian pendistribusian kuesioner tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Rincian Penyebaran Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Kuesioner yang disebar	28	100
2	Kuesioner yang kembali	25	89,29
3	Kuesioner yang tidak kembali	3	10,71
4	Kuesioner yang cacat	0	0
5	Kuesioner yang diolah	25	100

Sumber: Data Primer yang Diolah

a. Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Berikut ini disajikan karekteristik responden menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-Laki	14	56%
Perempuan	11	44%
Total	25	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sekitar 14 orang (56%) dan yang berjenis kelamin perempuan sekitar 12 orang atau (44%). Dari angka tersebut menggambarkan bahwa pegawai didominasi oleh laki-laki yang bekerja sebagai auditor dari jumlah sampel yang ada, Hal ini di sebabkan karena laki-laki memiliki tingkat emosional yang stabil dan tingkat kepercayaan yang tinggi dalam bekerja dibandingkan perempuan.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
Diploma/D3	0	0
Sarjana/S1	19	76%
Magister/S2	6	24%
Lainnya	0	0
Total	25	100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki pendidikan terakhir, Sarjana/S1 sebanyak 19 responden atau 76%, Magister sebanyak 6 responden atau 24%. Pendidikan terakhir pegawai yang mendominasi pada kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tersebut ialah Sarjana/S1 yaitu sebanyak 76%. Hal ini menunjukkan pegawai mampu bekerja dengan baik dengan menganalisis pekerjaan secara akurat. Banyaknya pendidikan Strata 1 memberikan manfaat yang besar bagi instansi karena dengan pendidikan yang bagus otomatis akan memberikan kontribusi besar buat organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang ingin di capai.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Tabel 5.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase (%)
< 5 Tahun	0	0
6-10 Tahun	11	44%
11-15 Tahun	7	28%
16-20 Tahun	1	4%
> 21 Tahun	6	24%
Total		100%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki lama bekerja 6-10 tahun sebanyak 11 orang atau 44%, 11-15 tahun sebanyak 7 orang atau 28%, 16-20 tahun sebanyak 1 orang atau 4%, >21 tahun sebanyak 6 orang atau 24%. Dari hasil tabel di atas, maka masa kerja karyawan Di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di dominasi dengan masa kerjanya di 6-10 tahun sebanyak 11 orang atau 44%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai di Inspektorat Daerah di Kabupaten Gowa sudah cukup berpengalaman di dalam pekerjaannya sehingga resiko kesalahan pada saat bekerja berkurang di karenakan pegawai sudah cukup berpengalaman yaitu dengan di dominasi masa kerja 6 – 10 tahun.

b. Deskripsi Tanggapan Responden/Variabel Penelitian

1. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Cara mengetahui apakah inspektorat sudah transparansi dan akuntabel yaitu dengan meneliti Penganggaran berbasis kinerja untuk mengetahui pendayagunaan dana yang tersedia apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan dari program tersebut.

Tabel 5.5
Tanggapan Responden Untuk Penganggaran Berbasis Kinerja

No	Indikator	Item (X)	Uraian	Skor Jawaban					Total
				5	4	3	2	1	
1.	Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran	a	F	17	8	0	0	0	25
			Percent	68%	32%	0%	0%	0%	100%
	b	F	10	15	0	0	0	25	
		Percent	40%	60%	0%	0%	0%	100%	
2.	Disiplin Anggaran	a	F	9	16	0	0	0	25
			Percent	36%	64%	0%	0%	0%	100%
3.	Keadilan Anggaran	a	F	12	13	0	0	0	25
			Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
4.	Efisiensi dan Efektifitas	a	F	15	10	0	0	0	25
			Percent	60%	40%	0%	0%	0%	100%
5.	Pendekatan Kinerja	a	F	13	11	1	0	0	25
			Percent	52%	44%	4%	0%	0%	100%
Akumulasi Jawaban Responden			F	76	73	1	0	0	150
			Percent	50,66%	48,67%	0,67%	0,00%	0,00%	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel independen. Untuk mengetahui secara lebih rinci distribusi jawaban responden maka dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :

Pernyataan X.1.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 responden atau 68%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab setuju sebanyak 8 responden atau 32%.

Pernyataan X.1.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 15 responden atau 60%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden atau 40%.

Pernyataan X.2.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 16 responden atau 64%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab setuju sebanyak 9 responden atau 36%.

Pernyataan X.3.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 48%.

Pernyataan X.4.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab sangat setuju setuju sebanyak 15

responden atau 60%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab setuju sebanyak 10 responden atau 40% .

Pernyataan X.5.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu menjawab Netral sebanyak 1 responden atau 4%. Selebihnya yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%.

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di inspektorat sudah transparansi dan akuntabel dengan penilaian paling tinggi yaitu menjawab sangat setuju sebanyak 76 Responden atau 50,66%, sedangkan paling terendah yaitu menjawab Netral sebanyak 1 responden atau 0,67%, Selebihnya menjawab Setuju sebanyak 73 Responden atau 48,67%.

2. Analisis Pengawasan Preventif Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.6
Tanggapan Responden Untuk Pengawasan Preventif

No	Indikator	Item (X)	Skor Jawaban					Total
			5	4	3	2	1	
1.	Review atas Kinerja SKPD	A	6	19	0	0	0	25
			24%	76%	0%	0%	0%	100%
2.	Jenjang Pembinaan Sumber daya manusia	A	11	12	2	0	0	25
			44%	48%	8%	0%	0%	100%
3.	Fungsi Pengendalian atas Pengelolaan Sistem informasi	A	14	9	2	0	0	25
			56%	36%	8%	0%	0%	100%
4.	Setiap SKPD menjalankan tugas pengendalian atas aset pemda	A	8	13	4	0	0	25
			32%	52%	16%	0%	0%	100%
5	Terdapat pemisahan fungsi dan otorisasi	a	11	14	0	0	0	25
			44%	56%	0%	0%	0%	100%
6	SKPD telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu	a	11	11	3	0	0	25
			44%	44%	12%	0%	0%	100%
7	SKPD telah melakukan dokumentasi yang baik atas pengendalian intern	a	9	15	1	0	0	25
			36%	60%	4%	0%	0%	100%
Akumulasi Jawaban Responden			70	93	12	0	0	175
			40 %	53,14 %	6,86 %	0%	0%	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah

Berdasarkan table 5.6 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel. Untuk mengetahui secara lebih rinci distribusi jawaban responden maka dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :

Pernyataan X.1.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 19 responden atau 76%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 responden atau 24%.

Pernyataan X.2.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 12 responden atau 48%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab netral sebanyak 2 responden atau 8%, selebihnya menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%.

Pernyataan X.3.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab Sangat setuju sebanyak 14 responden atau 56%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab netral dan sebanyak 2 responden atau 8%. Selebihnya yaitu 9 responden atau 36% menjawab setuju.

Pernyataan X.4.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab netral dan sebanyak 4 responden atau 16%. Selebihnya yaitu 8 responden atau 32% menjawab sangat setuju.

Pernyataan X.5.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 14 responden atau 56%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%.

Pernyataan X.6.a dapat diketahui bahwa penilaian sangat setuju dan setuju yaitu sebanyak 11 responden atau 44% nilainya sama, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 responden atau 12%.

Pernyataan X.7.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 15 responden atau 60%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab Netral sebanyak 1 atau 4%,Selibhnya menjawab Sangat setuju dengan 9 responden atau 36%.

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa sistem pengawasan sudah dijalankan dengan baik yaitu dengan penilaian paling tinggi menjawab setuju sebanyak 93 Responden atau 53,14%, sedangkan paling terendah yaitu menjawab Netral sebanyak 12 responden atau 6,86%, Selibhnya menjawab Sangat Setuju sebanyak 70 Responden atau 40%.

3. Analisis Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.7
Tanggapan Responden Untuk Pengawasan Fungsional

Indikator	Item (X)	Uraian	Skor Jawaban					Total
			5	4	3	2	1	
1. Pengawasan	A	F	12	13	0	0	0	25
		Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
	B	F	10	15	0	0	0	25
		Percent	40%	60%	0%	0%	0%	100%
	C	F	10	15	0	0	0	25
		Percent	40%	60%	0%	0%	0%	100%
2. Pengkajian	A	F	9	16	0	0	0	25
		Percent	36%	64%	0%	0%	0%	100%
	B	F	11	14	0	0	0	25
		Percent	44%	56%	0%	0%	0%	100%
3. Pengusutan	A	F	12	13	0	0	0	25
		Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
	B	F	16	9	0	0	0	25
		Percent	64%	36%	0%	0%	0%	100%
Akumulasi Jawaban Responden		F	80	95	0	0	0	175
		Percent	45,71%	54,29%	0,67%	0,00%	0,00%	100%

Sumber : Data Primer yang di olah

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel . Untuk mengetahui secara lebih rinci distribusi jawaban responden maka dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :

Pernyataan X.1.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 48%.

Pernyataan X.1.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 15 responden atau 60 %, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden atau 40%.

Pernyataan X.1.c dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 15 responden atau 60 %, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden atau 40%.

Pernyataan X.2.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 16 responden atau 64%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden.

Pernyataan X.2.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 14 responden atau 56%,

sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%.

Pernyataan X.3.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 48% .

Pernyataan X.3.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden atau 64%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab setuju sebanyak 9 responden atau 36%.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan di Inspektorat sudah Baik dan dinyatakan sudah transparansi dan akuntabel dengan penilaian paling tinggi yaitu menjawab setuju sebanyak 95 Responden atau 54,29%, sedangkan paling terendah yaitu menjawab Setuju sebanyak 80 responden atau 45,71%

4. Analisis Efektifitas Pengendalian Anggaran Pengelolaan Keuangan

Tabel 5.8
Tanggapan Responden Untuk Efektivitas Pengendalian Anggaran

Indikator	Item (X)	Uraian	Skor Jawaban					Total
			5	4	3	2	1	
1. Realisasi Anggaran	A	F	12	13	0	0	0	25
		Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
2. Kesesuaian dengan peraturan	A	F	11	13	1	0	0	25
		Percent	44%	52%	4%	0%	0%	100%
	B	F	11	10	4	0	0	25
		Percent	44%	40%	16%	0%	0%	100%
3. Hasil berdaya guna	A	F	12	13	0	0	0	25
		Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
	B	F	7	18	0	0	0	25
		Percent	28%	72%	0%	0%	0%	100%
4. Mengatasi Hambatan dan Penyimpangan	A	F	12	13	0	0	0	25
		Percent	48%	52%	0%	0%	0%	100%
	B	F	16	9	0	0	0	25
		Percent	64%	36%	0%	0%	0%	100%
Akumulasi Jawaban Responden	F	81	89	5	0	0	175	
	Percent	46,29%	50,86%	2,85%	0,00%	0,00%	100%	

Sumber : Data Primer yang telah di olah

Berdasarkan table 5.8 dapat dilihat uraian frekuensi distribusi jawaban responden untuk masing-masing pernyataan variabel . Untuk mengetahui secara lebih rinci distribusi jawaban responden maka dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :

Pernyataan X.1.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 12 responden atau 48%.

Pernyataan X.2.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab netral sebanyak 1 responden atau 4%, selebihnya menjawab sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%.

Pernyataan X.2.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab Sangat setuju sebanyak 11 responden atau 44%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab netral dan sebanyak 4 responden atau 16%. Selebihnya yaitu 10 responden atau 40% menjawab setuju.

Pernyataan X.3.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju dan sebanyak 12 responden atau 48%.

Pernyataan X.3.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 18 responden atau 72%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden atau 28%.

Pernyataan X.4.a dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab setuju sebanyak 13 responden atau 52%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju dan sebanyak 12 responden atau 48%.

Pernyataan X.4.b dapat diketahui bahwa penilaian yang paling tinggi yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 16 responden atau 64%, sedangkan penilaian terendah yaitu yang menjawab sangat setuju sebanyak 9 responden atau 36%.

Berdasarkan Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa Pengendalian di Inspektorat sudah baik dengan penilaian paling tinggi yaitu menjawab setuju sebanyak 89 Responden atau 50,86%, sedangkan paling terendah yaitu menjawab Netral sebanyak 5 responden atau 2,85%, Selebihnya menjawab Sangat Setuju sebanyak 81 Responden atau 46,29.

Tabel 5.9
Total Akumulasi Jawaban Responden

No	Indikator	Skor Jawaban					Total
		5	4	3	2	1	
1	Penganggaran Berbasis Kinerja	76	73	1	0	0	150
2	Pengawasan Preventif	50	67	8	0	0	125
3	Penganggaran Fungsional	80	95	0	0	0	175
4	Efektifitas pengendalian Anggaran	81	89	5	0	0	175
Total// 25 item		287/25	324/25	14/25	0	0	625/25
		11,48	12,96	0,56	0	0	25

Sumber : data yang di olah

5. Hasil Penelitian

Bobot Nilai = SS (5),S (4),N (3), TS (2),STS (1)

Menghitung Skor Total Item :

$$T \times P_n$$

Dimana:

T : Total jumlah responden yang memilih

P_n : Pilihan angka Skala Likert

(Setelah itu semua hasil Dijumlahkan untuk mendapatkan total skor)

$$= 5(11,48)+4(12,96)+3(0,56)+2(0)+1(0)$$

$$= 57,4 + 51,84 + 1,68$$

= 110,92

Rumus Interval :

$I = 100/\text{Jumlah Skor (Likert)}$

$I = 100/5 = 20$ maka tabel presentasinya adalah yaitu :

Interval	Pernyataan
0% - 19%	Sangat tidak setuju, buruk
20% - 39%	Tidak setuju atau Kurang baik
40% - 59%	Cukup atau Netral
60% -79%	Setuju, Baik
80% -100%	Sangat Setuju, Sangat Baik

Mendapatkan hasil interpretasi, harus di ketahui skor tertinggi (Y) dan angka terendah (X) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut :

$Y = \text{Skor tertinggi likert} \times \text{jumlah responden (Angka tertinggi 5)}$

$X = \text{Skor terendah likert} \times \text{jumlah responden (Angka terendah 1)}$

Jumlah skor tertinggi untuk item sangat setuju ialah $5 \times 25 = 125$, sedangkan item sangat tidak setuju ialah $1 \times 25 = 25$ jadi jika skor responden di peroleh angka 110,92 maka hasilnya akan di hitung melalui rumus index%.

Rumus Index % = Total skor / Y x 100

= Total skor / Y x 10

=110,92/125 x 100

= 88,736% =88,74% Kategori jawaban **SANGAT BAIK**

Berdasarkan hasil Analisis data di atas dapat di simpulkan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja, Pengawasan Preventif, Pengawasan Fungsional dan Efektifitas Pengendalian Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan daerah berjalan sangat baik dengan persentase 88,74% sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah Transparansi dan Akuntabel. (Joni Iskandar,2015) Semakin baik pengawasan dan pengendalian maka pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif dan laporan keuangan akan lebih transparan dan akuntabel. Transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak –pihak yang membutuhkan informasi (Madiarsomo,2001).

Transparansi dan Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dan pengendalian keuangan daerah (chabib, 2010)

Tabel 5.10
Evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa

Uraian	PERDA	Keterangan
Transparansi dan akuntabilitas anggaran		
1. Dokumen RPJMD harus menjabarkan mengenai visi, misi dan program kerja	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004	Telah terlaksana
2. Laporan SKPD harus sesuai SAP	Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010	Telah terlaksana
3. RKA harus memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, PMDN No 52 tahun 2015	Telah terlaksana
Pengawasan Preventif		
4. Setiap SKPD telah memiliki jenjang pembinaan SDM sebagai bagian dari pengawasan	PMDN No. 25 Tahun 2015	Telah terlaksana
5. Setiap SKPD menjalankan tugas pengendalian atas asset pemda	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006	Telah terlaksana
6. Sudah mendapat pemisahan fungsi, otorisasi pada setiap bagian di SKPD	Peraturan Bupati Gowa Nomor 42 Tahun 2016	Telah terlaksana
7. SKPD telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999	Belum terlaksana
Pengawasan Fungsional		
8. Kegiatan di SKPD di kontrol dengan	Reviu LKPD, LKIP	Telah

indikator kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan suatu program, kejelasan sasaran anggaran suatu program, melakukan analisis keuangan setiap kegiatan	dan RKA	terlaksana
Efektivitas Pengendalian Anggaran		
9. Setiap bagian dari SKPD sudah diberikan petunjuk dan teknis perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran, batasan dalam proses penyusunan anggaran dan lainnya.	PMDN No.52 Tahun 2005	Telah terlaksana

Sumber : Data primer yang di olah

Dari data di atas dapat di simpulkan bahwa dari 9 pernyataan di atas 8 sudah di laksanakan sesuai dengan peraturan dan 1 belum di laksanakan sesuai peraturan. hal ini di karenakan dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gowa, aparat pengawasan belum didukung oleh instrumen sistem dan prosedur audit yang memadai, walaupun mereka umumnya telah mengikuti jenjang pendidikan auditor dan pejabat pengawas. Kelemahan yang paling mendasar adalah fenomena hasil pemeriksaan pada umumnya tidak tepat waktu dalam pelaporan sehingga hasil yang diharapkan untuk mendukung pihak manajemen dalam pengambilan keputusan, manfaatnya menjadi berkurang karena rekomendasi yang dikeluarkan telah kehilangan momen. Demikian juga dengan pra pemeriksaan yang tidak direncanakan dengan baik padahal salah satu standar audit adalah pemeriksaan/audit harus direncanakan.

Hasil audit yang tidak tepat saji masih sering ditemukan karena supervisi dan kendali mutu yang tidak berjalan dengan optimal secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai pada pengendali teknis. Laporan Hasil Pemeriksaan

masih sering ditemukan kesalahan teknis dalam penyajian. Penyusunan kertas kerja pemeriksaan yang merupakan salah satu indikator kualitas hasil pemeriksaan belum tertata dengan baik, padahal semua temuan dalam laporan hasil pemeriksaan harus didukung oleh bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material.

B. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 3 yang sekarang telah diperbaharui menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD serta rancangan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang dimulai dari tata cara penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dengan mengikuti aturan perundang-undangan tersebut maka dapat mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas atas pengelolaan keuangan. Salah satu regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat yaitu membuat suatu sistem aplikasi yang dapat mengatur dalam penyusunan APBD mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan di instansi Pemerintahan.

Satu bentuk konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara adalah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa merupakan entitas Pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual. Sebagai entitas Pemerintah, Pemda Gowa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* sudah berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 (Hj. NURLIA., S.Sos., M.Si)

Sesuai dengan fungsi teori *stewardship* disini juga menjaga kepercayaan yang diberikan *principal* seperti meningkatkan transparansi dan kinerjanya dengan menjalankan SAP berbasis akrual secara bersungguh-sungguh karena dengan menerapkan SAP tersebut diyakni dapat mencerminkan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Teori *stewardship* ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pemerintah bekerja atas nama rakyat dan selalu berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dan berguna bukan hanya untuk individu melainkan untuk masyarakat luas sehingga dapat menjadi dasar pemikiran agar tata kelola pemerintahan jauh dari tindakan oportunistik.

Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pula pada suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan keuangan daerah harus berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan, sesuai SAP dan SOP agar laporan keuangannya lebih transparansi dan akuntabel yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses

penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Hj. NURLIA.,S.Sos.,M.Si)..

Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu pengukuran kinerja Inspektorat, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal pada Pemerintah Daerah (APIP) harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Perolehan opini LKPD 5 (lima) Tahun Anggaran terakhir 2012-2016 Target capaian memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP) dimana realisasi capaian untuk ke lima tahun tersebut adalah WTP. Terhadap capaian tersebut, pada periode 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Gowa akan berusaha untuk mempertahankannya sebagai wujud tranparansi dari semangat *good government*.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Urusan penyelenggaraan pemerintahan yang hampir semuanya dilaksanakan melalui pusat sudah mulai didistribusikan kepada daerah berdasarkan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang, hal ini mengingat volume dan aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di daerah sedemikian kompleks

serta memerlukan penyelesaian yang cepat dan tepat, diperlukan adanya pengawasan yang intensif. Hal ini dimaksudkan guna menjamin terselenggaranya urusan pemerintahan dan pembangunan dalam kerjasama yang serasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah tingkat atasnya.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*, pengawasan dan pengendalian juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Hj. NURLIA., S.Sos., M.Si).

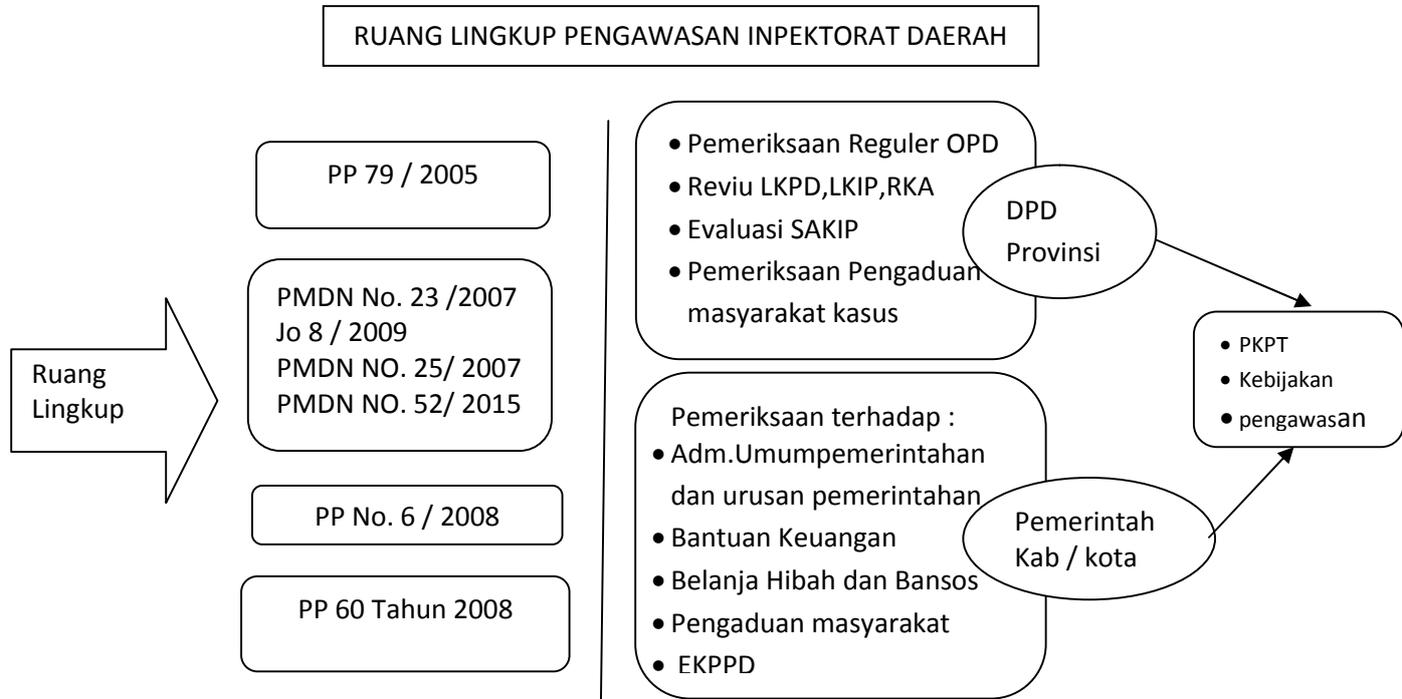
Berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu adanya pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang dicapai dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dalam tata aturan pemerintahan kita kenal adanya lembaga Pengawasan Pembangunan, baik pengawasan Internal maupun Eksternal. Pengawas eksternal adalah

BPK dan BPKP. Sedangkan di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan unsure pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengawasan:

- a. Menetapkan standar pelaksanaan (Perencanaan) Dalam melakukan pengawasan harus mempunyai standar yang jelas.
- b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan Mengukur kinerja pegawai SKPD, sejauhmana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan organisasi sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.
- c. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan-penyimpangan
- d. Pengambilan tindakan koreksi yaitu Melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Gambar 5.1 Ruang Lingkup Pengawasan Daerah



Semua SKPD di Kabupaten Gowa sudah dijalankan sesuai SOP, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di inspektorat daerah secara langsung mengecek kelengkapan. Inspektorat mengaudit setiap triwulan atau bulanan untuk mengecek kecocokan apakah betul yang dia pertanggungjawabkan itu sesuai dengan apa yang dianggarkan dan apa yang ditetapkan (Hj. NURLIA.,S.Sos.,M.Si)

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang secara sistematis merupakan aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Olehnya itu setiap instansi

berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pemerintah Kabupaten Gowa berdasarkan hasil penilaian LKj tahun 2015 yang dilakukan KeMenpanRB pada tahun 2016 mendapat nilai CC atau predikat “Cukup”. Inspektorat Kabupaten berupaya untuk tetap mendorong peningkatan kinerja SKPD dengan memberikan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait dengan implementasi SAKIP.

Paradigma fungsi pengawasan internal dan pengendalian di Pemerintahan Daerah membawa peran dan fungsi tidak hanya mencari kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi (*watchdog*), melainkan juga berperan sebagai lembaga penjamin mutu (*quality assurance*) dan pemberian konsultasi (*consulting*), diharapkan sekaligus menjadi mitra bagi auditor dalam membantu mencari solusi bagi setiap permasalahan yang ada atau yang akan timbul tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas pengelolaan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah terlaksana dengan baik dan efektif di lihat dari pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dari jawaban hasil kuesioner 88,74% yang berarti bahwa persentase tersebut dalam ketegori sangat baik.
2. Perolehan opini LKPD 5 (lima) tahun anggaran 2012-2016 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian mencerminkan bahwa laporan keuangan sudah transparan sedangkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dapat di lihat dari Implementasi SAKIP dimana Pemerintah Daerah berdasarkan hasil LKj tahun 2015 yang di lakukan KemenpanRB pada tahun 2016 mendapat nilai CC atau predikat Cukup.
3. Pengelolaan pemerintah di Daerah Kabupaten Gowa telah dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaporan pengelolaan APBD terhadap masyarakat sudah sesuai aturan yang

berlaku yaitu dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat pemerintah No.71 Tahun 2010.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Keuangan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sehingga lebih membawa dampak yang baik bagi pengelolaan keuangan dalam mewujudkan *good governance*. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah :

1. Memberikan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait dengan Implementasi SAKIP untuk tetap mendorong peningkatan kinerja.
2. Sistem pengawasan dan pengendalian keuangan Dispenda supaya lebih di tingkatkan untuk menunjang terciptanya pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Gerry. 2013. pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi Laporan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. *skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/80>, (12 Feb 2018).
- Afiah, Nunuy Nur. Akuntansi Pemerintahan: *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Dian Mundira. 2017. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pegawai Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, *skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Alauddin Makassar.
- Fandi Wijaya (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *skripsi*, Fakultas ekonomi Universitas Lampung.
- Fifit Purnama, Nadirsyah (2016), Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 1, No. 2, (2016) Halaman 01-15
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Fitri Zalni (2013), Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, *skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.

<http://news.rakyatku.com/read/32406/2016/12/22/bpk-serahkan-laporan-hasil-pemeriksaan-kinerja-ke-pemkab-gowa>.

Joni Iskandar (2015), Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, Vol. 2 No. 2.

Josua H.R.Lumbantobing (2013), Analisis Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara).

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sadono Sukirno, 1994, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Siti Nurjannah Saleba (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, *skripsi*, Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi
Ketiga. Yogyakarta. BPFE

Syahrir Malle. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas
Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Alauddin
Makassar.

Tuasikal, Askam, (2007), Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan
Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*,
Vol.08, No.01, Februari 2007.

Wiguna, Made BS., Yuniartha G., dan Darmawan N. 2015. Pengaruh
Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, *e-Journal* Vol. 3 No.
1.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Partisipasi Kinerja Pegawai Inspektorat Kabupaten Gowa

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi	Target SPK	Target IKK	Target Indikator Kinerja	Target Rata-rata Tahun ke-					Pencapaian Capaian Tahun ke-					Pencapaian	
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012
Meningkatkan Keabsorbtifan Pegawai Pemerintah Daerah dan Berprestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah															
Agenda Pemerintahan Tidak terlewat minimal 80%		80%		80%	70%	80%	80%	85%	78%	82%	83%	85%	87%	137%	88%
Agenda pemerintahan Kabupaten yang		Capa 100%		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
Agenda Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan		Sesuai Tugas Fungsi		T	T	T	T	T	T	85	87	87	87		
Kelembagaan IKK yang sesuai & terdapat di		Sesuai		00	00	00	00	00	0	0	10	00	00		

Nomor: 070 / ORB.P/2018
 Lampiran
 Pejabat: **Rekamersifid Penelitian**
 201844
 Yth. Ka. Inspektorat Kab. Gowa
 Di:
JEDDA

Berkenaan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 6339/S.01/PTSP/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Dengan ini disampaikan kepada saudara beliau yang tersebut di bawah ini:
 Nama : ANI OKTAVINA
 Tempat/Tanggal Lahir : Puloandang-Pangajene, 11 Juni 1997
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Monevobatang Kec. Burembong

Berkenaan akan mendapatkan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penelitian Skripsi/Teas di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOMBAAN DAN PENGALIAN PERUMAHAN DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA)"
 Selama : 17 Mei s.d 17 Juli 2018
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk pada prinsipnya kami dapat memperlakukan kegiatan tersebut dengan ketentuan :
 1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan kami melapor kepada Bupati Gowa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.
 2. Penelitian/Pengumpulan Data tidak menyimpang dari isi yang diberikan.
 3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan serta keselamatan orang lain.
 4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa.
 Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk keabsorbtifan pelaksanaan dimintai dukungan dan persetujuannya.



LEMBAR KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ani Oktavina
 Nomor Stambuk : 105730511114
 Prog.Studi/Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Nama Pembimbing I : Abd.Salam,SE.,M.SI,AK.CA
 Judul Proposal : Analisis Sistem Pengawasan dan Pengendalian
 Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
 (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten gowa)

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan/Saran	Paraf/Tanda Tangan
1.		Penulis di ESI Pembahasan lebih srtm.	[Signature]
2.		Pembahasan di ESI Tulis lebih lengkap.	[Signature]
3.		Analisis transaksi di sistem di ESI	[Signature]
4.		Lengkap	[Signature]

Makassar, 12 Agustus 2018

Mengetahui
 Ketua Jurusan Akuntansi

Imail Badolahi, SE., M.SI, AK.CA

KUESIONER PENELITIAN

A. Deskripsi Responden

Nama Instansi : INSPEKTORAT DAERAH KAB. GOWA

Nama Responden : FATMAWATI

Tanggal Pengisian : 11 JULI 2018

Jenis Kelamin : ~~Laki~~ Laki / Perempuan

Pendidikan Terakhir :
SLTA/Sederajat
Diploma (D3)
Strata 1 (Sarjana) ✓
Strata 2 (Master)
Strata 3 (Doktor)

Jabatan : AUDITOR
Kepala Badan/Dinas/Instansi
Sekretaris/Kabid/Kabag
Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie

Lama Bekerja :
1 - 5 tahun
6 - 10 tahun ✓
11 - 15 tahun
16 - 20 tahun
≥ 21 tahun

B. Pernyataan mengenai Penganggaran Berbasis Kinerja

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda centang (✓) pada salah satu alternatif jawaban.

Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Kategori	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(N) Netral	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
1	1	2	3	4	5

Pernyataan	Penilaian				
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Transparansi dan akuntabilitas anggaran					
1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kerja daerah.				✓	
2. Laporan keuangan SKPD harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.				✓	
Disiplin anggaran					
3. Anggaran SKPD mengacu kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas				✓	
Keadilan anggaran					
4. Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD harus sesuai dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)				✓	
Efisiensi dan efektifitas anggaran					
5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) harus memperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas					✓
Pendekatan kinerja					
6. Evaluasi harus dilakukan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, SKPD apakah telah sesuai dengan target					✓

Sumber Bpkp (2007)

C. Pengawasan Preventif

Pernyataan	Penilaian				
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1. Pimpinan telah melakukan review atas kinerja SKPD			✓		
2. Setiap SKPD telah memiliki jenjang pembinaan sumber daya manusia sebagai bagian dari pengawasan.			✓		
3. Setiap SKPD menjalankan fungsi pengendalian atas pengelolaan informasi				✓	

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Realisasi anggaran					
1. Setiap bagian dari SKPD sudah diberikan Petunjuk tentang teknik perhitungan perkiraan pendapatan dan pengeluaran			✓		
Kesesuaian dengan peraturan					
2. Setiap bagian dari SKPD memiliki batasan dalam proses penyusunan anggaran				✓	
3. Setiap bagian dari SKPD memiliki batasan waktu dalam penyampaian informasi Anggaran				✓	
Hasil berdaya guna					
4. Setiap bagian dari SKPD sudah memiliki petunjuk tentang waktu yang tepat dalam Melepaskan dana				✓	
5. Anggaran pada setiap bagian dari SKPD tidak memungkinkan adanya anggaran biaya yang terlalu besar dan tidak efisien				✓	
Mengatasi hambatan dan penyimpangan					
6. Hambatan sumber daya manusia telah diantisipasi dengan baik dengan menempatkan SDM yang tepat dalam menyusun anggaran			✓		

Sumber: Widjaja (2004)

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan APBD?

2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan?
3. Apakah dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berbagai kaidah dalam pelaksanaannya telah dipatuhi oleh semua pihak yang terkait?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa? Apakah bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan?

4. Setiap SKPD menjalankan tugas pengendalian atas asset pemda			✓		
5. Sudah terdapat pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting pada setiap bagian di SKPD			✓		
6. SKPD telah melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian			✓		
7. SKPD telah melaksanakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi dan kejadian penting			✓		

Sumber: Peraturan Kemenkeu No 152 tahun 2011

D. Pengawasan Fungsional

Pernyataan	Penilaian				
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Pengawasan					
1. Kegiatan di SKPD telah dikontrol dengan indikator kinerja yang jelas untuk menilai keberhasilan suatu program.			✓	✓	
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pimpinan di SKPD				✓	
3. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program				✓	
Pengkajian					
4. SKPD telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.				✓	
5. Ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan				✓	
Pengawasan					
6. SKPD telah melakukan pengecekan terhadap jalannya program.				✓	
7. SKPD telah membuat laporan kepada semua setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.				✓	

RIWAYAT HIDUP



Ani Oktavina, lahir pada tanggal 11 Juni 1997 di Pandang

– Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak pertama

dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Muh Risa dan

Ibu Muliati. Jenjang pendidikan formal yang pernah

ditempuh penulis adalah Sekolah Dasar yaitu SDN Moncobalang pada tahun

2008, selanjutnya pada SMPN 3 Bajeng dan lulus pada tahun 2011, kemudian

melanjutkan di SMKN 1 Gowa dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan memilih program studi

akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar.